Membaca Kepentingan-Kepentingan Politik Hizbut Tahrir Indonesia

written by Dr. (c) Khalilullah, S.Ag., M.Ag.

Harakatuna.com. Isu terkait muncul dan dibubarkannya organisasi keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukanlah sesuatu yang baru kita dengar. Sebenarnya organisasi ini berasal dari luar Indonesia. Beriring waktu ideologinya tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

Ada banyak warga Indonesia yang terpapar ideologi HTI, meski sampai sekarang belum bertobat, bahkan masih getol mengampanyekan ideologi ini. Sebut saja, Ismail Yusanto dan Felix Siauw. Mereka berdua termasuk orang berpengaruh di HTI. Bahkan, keduanya menggunakan beberapa cara, termasuk media sosial, dalam mempromosikan HTI.

Saya tidak habis pikir mengapa kedua orang ini (Ismail Yusanto dan Felix Siauw) masih setia mengampanyekan ideologi HTI. Saya tidak percaya jika perjuangan mereka untuk umat. Dari sisi namanya saja, HTI berarti Partai Pembebasan Indonesia. Sebutan partai ini tak beda jauh dengan beberapa partai lain yang

dijadikan kendaraan politik, semisal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan seterusnya.

Sebagai partai politik, HTI jelas berbeda dengan organisasi keagamaan semisal Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang keduanya dibangun bukan untuk kepentingan politik yang bersifat sementara, melainkan untuk kepentingan agama yang abadi. Karena itu, perlu dicurigai ideologi HTI yang dukampanyekan di pelbagai wilayah di Indonesia. Dan, sepertinya ideologi tersebut perlu kita kaji ulang. Pertama, terkait ideologi Khilafah. Khilafah termasuk ajaran paling inti (rukun iman) dalam HTI. Orang HTI berkeyakinan, Khilafah adalah syariat Islam yang semestinya dijadikan sistem kehidupan manusia dalam bernegara.

Negara yang menggunakan sistem Khilafah, bagi HTI, termasuk negara Islam yang dapat dibenarkan. Padahal, Islam tidak menentukan sistem suatu negara. Islam membebaskan manusia menggunakan sistem apa saja. Baik sistem Demokrasi dan lain sebagainya. Yang terpenting sistem ini mengantarkan manusia menggapai kemaslahatan. Tidak perlu, sistem suatu negera dicukupkan pada sistem Khilafah. Membatasi sistem negara pada Khilafah jelas tidak dapat dibenarkan.

Kedua, terkait mendirikan Negara Islam (Daulah Islamiyah). Negara Islam ini berkaitan erat dengan Khilafah. Maksudnya begini, negara yang menggunakan sistem Khilafah pasti disebut negara Islam. Sebaliknya, negara yang tidak menggunakan sistem Khilafah disebut negara kafir. Begitulah cara berpikir orang HTI. Orang HTI menolak sistem Demokrasi yang digunakan Indonesia. Padahal, sistem Demokrasi dibuat untuk kepentingan umat yang berbeda agama. Karena, di Indonesia sendiri bukan hanya terdapat satu agama, melainkan banyak agama, mulai agama Islam hingga agama Konghucu.

Munculnya istilah Negara Islam dan Negara Kafir jelas itu hanya untuk kepentingan politik. Orang HTI yang bersikeras menguasai Indonesia akan selalu mencari cara, termasuk dengan cara menghadirkan isu berdirinya negara Islam. Isu ini secara tidak langsung menyerang negara bangsa semisal Indonesia. Tapi, serangan politik HTI lemah, sehingga sampai detik ini pun siasat politik mereka mudah terbaca dan serangannya cukup mudah dikalahkan.

Sampai di sini, sudah jelas bahwa perjuangan HTI hanya untuk kepentingan politik, tidak lebih dari itu. Isu politik yang mereka umpan adalah Khilafah dan

berdirinya Negara Islam (Daulah Islamiyah). Maka, berhati-hatilah dari partai semacam ini yang hanya menggunakan agama untuk kepentingan politik.[] *Shallallah ala Muhammad.*